

KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PANGANDARAN

Via Novitasari

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Email :Vianovitasari221@gmail.com

ABSTRAK

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi objek wisata diduga disebabkan oleh kurangnya optimalnya pengelolaan retribusi objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Pengelolaan retribusi objek wisata sesuai belum sesuai dengan bagian-bagian atau unsur-unsur pengelolaan menurut Handyaningrat (2005:127) karena kurangnya perencanaan yang melibatkan petugas pemungut retribusi menyebabkan hasil akhir tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, selain itu alat-alat yang digunakan kurang mendukung kegiatan pengelolaan retribusi objek wisata, dalam penggunaan sumber-sumber kurang sesuai dengan yang diharapkan, anggaran dan sarana serta prasarana, selain itu terkait dengan pengawasan yang dilakukan belum optimal karena penilaian kurang dilakukan secara rutin. Adanya hambatan-hambatan pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran hal ini dikarenakan petugas kurang dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pemungutan retribusi objek wisata, kurangnya kesesuaian dalam penempatan petugas dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki petugas, kurangnya bimbingan dan pengarahan kepada petugas, serta kurangnya penilaian secara rutin terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata. Adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan melibatkan petugas dalam perencanaan kegiatan pemungutan retribusi objek wisata, penempatan petugas telah disesuaikan dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki petugas, serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata, serta meningkatkan penilaian secara rutin terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata.

Kata Kunci : *Pengelolaan Retribusi Objek Wisata, Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

Pengelolaan kegiatan pariwisata tentu sangat diperlukan dalam upaya menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan bagaimana wisatawan membelanjakan uang sebanyak-banyaknya selama melakukan wisata. Makin lama wisatawan berada di suatu tempat wisata akan meningkatkan pengeluaran mereka, sehingga akan membangkitkan perusahaan jasa transportasi, hiburan, akomodasi, dan jasa lainnya. Oleh karena itu pengelolaan dan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-masing daerah. Begitu juga dengan Kabupaten Pangandaran yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Beberapa objek wisata unggulan di kawasan ini sudah dikenal luas, bahkan hingga mancanegara, antara lain objek wisata Pantai Pangandaran, Cagar Alam Pananjung, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Citumang, serta Cukang Taneuh atau yang lebih populer dengan sebutan Green Canyon. Objek-objek wisata tersebut selalu dibanjiri pengunjung tiap masa liburan.

Obyek wisata pantai Pangandaran merupakan taman wisata yang memiliki berbagai keistimewaan seperti pantainya landai dengan air yang jernih serta jarak antara pasang dan surut relatif lama sehingga memungkinkan kita untuk berenang dengan aman, terdapat pantai dengan hamparan pasir putih dan terdapat taman laut dengan ikan-ikan dan kehidupan laut yang mempesona. dengan pemandangan alamnya yang sangat indah. Obyek wisata pantai Pangandaran sangat

diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Pangandaran. Tetapi keberadaan obyek wisata pantai Pangandaran ini akan kurang berdaya guna apabila pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran sebagai pihak pengelola tidak berupaya untuk mengelolanya dengan baik. Dalam hal ini terutama faktor-faktor penunjang obyek wisata seperti daya tarik, sarana dan prasarana serta promosi.

Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai potensi kepariwisataan. Beberapa objek wisata unggulan di kawasan ini sudah dikenal luas, bahkan hingga mancanegara, antara lain objek wisata Pantai Pangandaran, Cagar Alam Pananjung, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Citumang, serta Cukang Taneuh atau yang lebih populer dengan sebutan Green Canyon. Objek-objek wisata tersebut selalu dibanjiri pengunjung tiap masa liburan datang.

Namun berdasarkan data yang diperoleh penulis, ditemukan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran melalui retribusi Objek Wisata belum tercapai sesuai dengan target. Berdasarkan data kontribusi retribusi objek wisata Pangandaran terhadap pendapatan asli daerah belum tercapai sesuai target yang ditetapkan dimana hanya pada tahun 2015 yang tercapai melebihi target sebesar 0.26% namun pada tahun 2016 target PAD tidak tercapai karena kontribusi retribusi objek wisata hanya masuk 58.93% dari target yang ditetapkan, begitupula halnya dengan tahun 2017 dari target hanya tercapai sebesar 85.98% dan pada tahun 2018 dari target

yang ditetapkan hanya tercapai sebesar 79.25%.

Permasalahan pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi objek wisata diduga disebabkan oleh kurangnya optimalnya pengelolaan retribusi objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, hal ini terlihat dari adanya beberapa indikator sebagai berikut :

1. Kurangnya pengarahan kepada petugas pengelola objek retribusi sehingga pengelolaan retribusi objek wisata tidak tercapai sesuai target. Contohnya satuan khusus pemungut retribusi kurang memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan retribusi objek wisata.
2. Kurangnya kesesuaian dalam penempatan tugas dan fungsi pegawai dalam melakukan pengelolaan retribusi objek wisata. Contohnya : petugas pemungut retribusi kurang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah yang diamanahkan dalam pemungutan retribusi objek wisata sehingga target retribusi objek wisata tidak tercapai.
3. Kurangnya dilakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata. Contohnya : kurangnya mengadakan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata sehingga masih terjadi kemacetan di pintu masuk karena tidak menggunakan sistem Online dalam pembelian tiket masuk ke objek wisata.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Retribusi Objek Wisata dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran”

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran?

KAJIAN PUSTAKA

Pariwisata merupakan sumber retribusi terhadap pendapatan daerah yang sangat potensial, hal tersebut terlihat hampir di setiap daerah mempunyai obyek pariwisata yang menjadi sorotan utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya atau menjadi ikon tersendiri dari daerah tersebut. Tidak sedikit daerah yang membentangkan lahannya menjadi lahan pariwisata dan menjadi sorotan publik.

Keberadaan objek wisata dapat dioptimalkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini maka diperlukan pengelolaan retribusi objek wisata.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan masalah pengelolaan retribusi objek wisata, maka tata urutan bagian-bagian atau unsur-unsur pengelolaan yang merupakan sistematika berpikir dalam pengelolaan, menurut Handyaningrat (2005: 127) meliputi :

- a. Hasil akhir, yaitu spesialisasi dari tujuan perencanaan, disini ditentukan apa yang ingin dicapai dan bilamana kita akan mencapainya
- b. Alat-alat yaitu meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur dan praktiknya. Disini ditentukan bagaimana menyelesaikan rencana
- c. Sumber-sumber yaitu meliputi kualitas, mendapatkan dan mengalokasikan bermacam-macam sumber diantaranya tenaga kerja, keuangan, material, tanah dan sebagainya
- d. Pelaksanaan yaitu menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya, sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan
- e. Pengawasan yaitu menentukan prosedur apa yang dilakukan dalam menemukan kesalahan, kegagalan daripada rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah

informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

a. Hasil Akhir

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi hasil akhir maka pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya melakukan sosialisasi mengenai rencana dalam mencapai tujuan pemungutan retribusi objek wisata kepada petugas serta kurangnya pemahaman petugas dalam menentukan target penerimaan retribusi objek wisata serta petugas kurang dilibatkan dalam menentukan sejumlah langkah yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut (2005: 127) menyatakan bahwa :

“Dalam mencapai hasil akhir pemungutan retribusi maka perlu memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi : 1. Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan, 2. Penyesuaian tarif, 3. Penyesuaian sistem tata laksana pungutan”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran dengan teori tersebut mengingat dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi masih kurang melibatkan petugas pemungut retribusi serta kurangnya sosialisasi kepada petugas menyebabkan hasil akhir pemungutan retribusi objek wisata belum mencapai target yang diharapkan.

b. Alat-Alat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi alat-alat maka pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman petugas terhadap kebijakan dalam melakukan pemungutan retribusi objek wisata sehingga petugas kesulitan dalam menentukan strategi sebagai alat dalam melakukan pemungutan retribusi objek wisata karena prosedur dalam melakukan pemungutan retribusi objek wisata kurang dipahami oleh petugas.

Sedangkan menurut Sidik (2015:119) menyatakan bahwa :

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan

asli daerah Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan sesuai dengan dimensi alat-alat karena dalam kenyataannya petugas kurang diberikan pengarahan mengenai kebijakan dalam melakukan pemungutan retribusi objek wisata sehingga petugas kesulitan dalam menentukan strategi sebagai alat dalam melakukan pemungutan retribusi objek wisata sehingga target penerimaan retribusi tidak tercapai dengan baik.

c. Sumber-sumber

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi sumber-sumber maka pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya dukungan petugas pemungutan retribusi objek wisata karena petugas kurang diberikan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana yang ada kurang memadai bagi petugas dalam melakukan pemungutan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Sidik (2015:125) menyatakan bahwa :

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan beberapa upaya seperti melakukan pengkajian dan pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan sesuai dengan dimensi sumber-sumber karena dalam kenyataannya petugas masih kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena

kurang mendapatkan dukungan anggaran dan sarana dan prasarana secara memadai sehingga menyebabkan target penerimaan retribusi dari objek wisata belum mencapai target yang diharapkan

d. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi pelaksanaan pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman petugas terhadap prosedur dalam melakukan pengelolaan terhadap penerimaan retribusi objek wisata karena kurangnya keterbukaan dalam melakukan pengelolaan retribusi objek wisata serta kurangnya kesesuaian dalam melakukan pembagian tugas dalam melakukan pengelolaan retribusi objek wisata.

Menurut Prakosa (2015:49) menyatakan bahwa :

Untuk dapat menentukan dasar pengenaan retribusi atau objek retribusi terhadap potensi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap potensi pendapatan daerah tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi, yaitu : kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, kesepakatan politik dan penilaian retribusi oleh pemerintah daerah

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan sesuai dengan dimensi pelaksanaan karena dalam kenyataannya petugas kesulitan dalam memahami berbagai prosedur dalam melakukan pengelolaan penerimaan

retribusi objek wisata karena kurangnya sosialisasi dalam melakukan pengelolaan retribusi objek wisata sehingga rencana yang telah ditetapkan belum dapat dicapai secara optimal.

e. Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi pengawasan dalam pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman petugas terhadap prosedur pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata serta kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata sehingga kesulitan dalam melakukan evaluasi untuk memperbaiki permasalahan dalam pelaksanaan *pemungutan* retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Anwar (2010: 27) menyatakan bahwa :

Dalam proses pengelolaan retribusi diperlukan kegiatan yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Melalui pengawasan dapat diketahui permasalahan yang terjadi sehingga dapat ditindaklanjuti untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan sesuai dengan dimensi pengawasan karena dalam kenyataannya prosedur pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata belum dapat dipahami oleh semua petugas pemungut retribusi objek wisata sehingga

menyebabkan kurangnya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata yang dilakukan oleh petugas yang menyebabkan evaluasi yang dilakukan belum dapat memperbaiki permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata.

2. Hambatan-hambatan

Pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran

Adapun hambatan-hambatan dalam penelitian ini antara lain :

a. Hasil Akhir

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran dilihat dari dimensi hasil akhir hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada petugas pemungut retribusi objek wisata sehingga setiap target yang ditetapkan tidak tercapai selain itu petugas kesulitan dalam menentukan sejumlah langkah atau kegiatan karena kurangnya pelibatan petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Sutanto (2014: 264) menyatakan bahwa :

Dalam pengelolaan retribusi perlu menyesuaikan dan memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelola pendapatan asli daerah, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi sehingga hasil akhir sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan jika dalam pelaksanaannya tidak menyesuaikan dan

memperbaiki aspek kelabagaan atau pengelolaan. Begitupula halnya dalam pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran diketahui bahwa pemungutan retribusi objek wisata masih kurang melibatkan petugas pemungut retribusi serta kurangnya sosialisasi kepada petugas menyebabkan hasil akhir pemungutan retribusi objek wisata belum mencapai target yang diharapkan.

b. Alat-alat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal jika dilihat dari dimensi alat-alat hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan karena kurangnya pemahaman petugas terkait dengan kebijakan dalam pemungutan retribusi objek wisata hal ini disebabkan jarang nya petugas memperoleh pengarahan terkait dengan mekanisme atau prosedur dalam pemungutan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Prasetyo (2011: 105) menyatakan bahwa :

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan alat-alat seperti biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan yang dapat meningkatkan pendapatan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan jika dalam pelaksanaannya petugas kurang memiliki pemahaman yang baik terkait dengan mekanisme atau prosedur dalam pemungutan retribusi objek wisata sehingga untuk mendukung kelancaran

suatu kebijakan maka diperlukan kegiatan pengarahan kepada petugas sehingga memiliki pemahaman dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata secara optimal.

c. Sumber-sumber

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi sumber-sumber maka pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan karena kurangnya dukungan sumber daya yang ada di dalam organisasi seperti kurangnya kerjasama antar petugas pemungut retribusi serta kurangnya anggaran bagi petugas pemungut retribusi objek wisata dalam melaksanakan tugasnya serta kurangnya sarana dan prasarana bagi petugas dalam melakukan pemungutan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Halim (2011: 135) menyatakan bahwa :

Pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber retribusi melalui pengembangan, perluasan pelayanan, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan serta menyediakan dukungan sumber daya yang dapat memperlancar pelaksanaan pemungutan retribusi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya hambatan dalam pemungutan retribusi objek wisata hal ini dikarenakan petugas kesulitan dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata karena kurangnya dukungan dari petugas lain selain itu kurangnya anggaran dan sarana prasarana yang diberikan bagi petugas menyebabkan target hasil pemungutan retribusi tidak dapat tercapai secara optimal.

d. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi pelaksanaan maka pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan karena kurangnya pengarahan dan sosialisasi kepada petugas sehingga petugas kurang memahami berbagai prosedur yang ditetapkan dalam melaksanakan pemungutan retribusi selain itu keterbatasan petugas yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugasnya karena seringnya mutasi petugas yang menyebabkan pegawai yang ada kurang memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Rahmi (2013:5) menyatakan bahwa :

Supaya memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, maka dalam pelaksanaan pemungutan retribusi harus dapat terciptanya :

1. Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah,
2. Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi.
3. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya,
4. Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya hambatan dalam pemungutan retribusi objek wisata hal

ini dikarenakan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata petugas kesulitan dalam memahami prosedur dalam pemungutan retribusi objek wisata karena kurangnya informasi yang disampaikan sehingga petugas terkesan kurang terbuka dalam melakukan pengelolaan retribusi objek wisata.

e. Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi pengawasan maka pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan karena belum optimalnya prosedur pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata karena pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata belum dilakukan secara rutin sehingga belum dapat dilakukan evaluasi untuk memperbaiki permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata

Sedangkan menurut Halim (2012:117) menyatakan bahwa :

Dalam proses pemungutan retribusi supaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maka diperlukan peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi :

1. Pengawasan dan pengendalian yuridis,
2. Pengawasan dan pengendalian teknis,
3. Pengawasan dan pengendalian penata usahaa

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya hambatan dalam pemungutan retribusi objek wisata hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata

petugas kesulitan dalam memahami prosedur dalam pemungutan retribusi objek wisata karena kurangnya pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata sehingga pemungutan retribusi objek wisata belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu kurangnya dilakukan pengawasan sehingga permasalahan yang terjadi belum dapat diselesaikan secara cepat.

3. Upaya –upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran

Adapun uaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penelitian ini antara lain

a. Hasil Akhir

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi hasil akhir maka ada berbagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran hal ini dikarenakan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada petugas mengenai rencana dalam mencapai target penerimaan retribusi objek wisata serta berupaya menentukan sejumlah langkah dalam mencapai target penerimaan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Rozali (2020:110) menyatakan bahwa :

Secara umum, untuk mencapai hasil akhir dalam pengelolaan retribusi maka diperlukan adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan retribusi daerah dengan cara memperluas basis

penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam pemungutan retribusi objek wisata yang antara lain adanya sosialisasi yang dilakukan kepada petugas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata sehingga prosedur dalam pemungutan retribusi objek wisata dapat dipahami oleh petugas. Selain itu meningkatkan pengawasan kepada petugas sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara cepat.

b. Alat-alat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi alat-alat maka ada berbagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran hal ini dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada petugas mengenai kebijakan dalam melakukan pengelolaan retribusi objek wisata, melibatkan semua petugas dalam merencanakan dan menentukan strategi pemungutan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Halim (2011:111) menyatakan bahwa :

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap prosedur dalam pemungutan retribusi maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola Pendapatan asli daerah dengan cara

meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam pemungutan retribusi objek wisata yang antara lain melakukan pelibatan semua petugas dalam merencanakan dan menentukan kebijakan dalam kegiatan pemungutan retribusi objek wisata sehingga setiap target yang ditetapkan dapat tercapai.

c. Sumber-sumber

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi hasil sumber-sumber maka ada berbagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran hal ini dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada petugas mengenai kebijakan dalam melakukan pengelolaan retribusi objek wisata, melibatkan semua petugas dalam merencanakan dan menentukan strategi pemungutan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Marihot, (2011: 90) menyatakan bahwa :

Untuk meningkatkan kapasitas penerimaan retribusi maka diperlukan dukungan sumber-sumber melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah sehingga kebutuhan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana dapat terpenuhi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam pemungutan retribusi objek wisata yang antara lain meningkatkan kerjasama petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata sehingga dapat saling membantu selain itu menyediakan dukungan anggaran kepada petugas sehingga mampu melaksanakan tugasnya dan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

d. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi pelaksanaan maka ada berbagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran hal ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada petugas sehingga memahami berbagai prosedur dalam melakukan pemungutan retribusi objek wisata, serta melakukan pembagian tugas kepada setiap petugas pelaksana sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.

Sedangkan menurut Kustiawan, (2015: 90) menyatakan bahwa :

Dalam memperkuat pelaksanaan proses pemungutan retribusi maka upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM sehingga target pelaksanaan pemungutan retribusi dapat tercapai.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam pemungutan retribusi objek wisata yang antara lain melakukan pembagian potensi diantara pelaku yang terlibat dalam

implementasi sehingga petugas memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata.

e. Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi pengawasan maka ada berbagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran hal ini dilakukan dengan menyusun prosedur pengendalian dalam pemungutan retribusi sehingga dapat meminimalisir adanya penyimpangan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan retribusi sehingga dapat melakukan evaluasi penerimaan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Darwin, (2010: 45) menyatakan bahwa :

Perlu adanya peningkatan pengawasan, hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran retribusi dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam pemungutan retribusi objek wisata yang antara lain melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan retribusi sehingga dapat melakukan evaluasi penerimaan retribusi objek wisata. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat retribusi objek wisata sangat penting untuk diawasi karena selain sebagai sumber penerimaan PAD yang besar juga rawan

penyimpangan sehingga diperlukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran dapat penulis simpulkan sebagai berikut.

1. Pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran diketahui bahwa Dinas Pariwisata selaku *leading sector* belum optimal dalam melakukan pengelolaan retribusi objek wisata sesuai dengan bagian-bagian atau unsur-unsur pengelolaan menurut Handyaningrat (2005:127) karena kurangnya perencanaan yang melibatkan petugas pemungut retribusi menyebabkan hasil akhir tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, selain itu alat-alat yang digunakan kurang mendukung kegiatan pengelolaan retribusi objek wisata karena kurangnya melakukan bimbingan dan pengarahan kepada petugas, dalam penggunaan sumber-sumber kurang sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya dukungan sumber daya manusia, anggaran dan sarana serta prasarana sehingga pengelolaan retribusi objek wisata belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, selain itu terkait dengan pelaksanaan kurang sesuai dengan yang ditetapkan karena kurangnya kesesuaian dalam penempatan petugas dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Selain itu terkait dengan pengawasan yang dilakukan belum optimal karena

penilaian kurang dilakukan secara rutin terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata sehingga permasalahan belum dapat diselesaikan secara cepat. Begitu pula dengan hasil observasi terlihat bahwa pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan yang diberikan kepada pegawai atau petugas pemungut retribusi objek wisata terutama dengan prosedur teknis dalam melakukan pemungutan retribusi yang belum dipahami oleh petugas karena minimnya kegiatan pembinaan dan pengarahan kepada petugas pelaksana.

2. Adanya hambatan-hambatan pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran hal ini dikarenakan petugas kurang dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pemungutan retribusi objek wisata, selain itu kurangnya kesesuaian dalam penempatan petugas dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki petugas, kurangnya bimbingan dan pengarahan kepada petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata, serta kurangnya penilaian secara rutin terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata sehingga permasalahan belum dapat diselesaikan secara cepat. Begitu pula dengan hasil observasi terlihat bahwa adanya hambatan pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan anggaran dan

sarana dan prasarana bagi petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata, selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada petugas pemungut retribusi objek wisata tentang prosedur teknis dalam melakukan pemungutan retribusi sehingga belum dipahami oleh petugas karena minimnya kegiatan pembinaan dan pengarahan kepada petugas pelaksana.

3. Adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran hal ini dilakukan dengan kurang melibatkan petugas dalam perencanaan kegiatan pemungutan retribusi objek wisata, selain itu dalam penempatan petugas telah disesuaikan dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki petugas, serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata, serta meningkatkan penilaian secara rutin terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara cepat. Begitu pula dengan hasil observasi terlihat bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran hal ini dilakukan dengan berupaya memberikan dukungan anggaran dan sarana dan prasarana bagi petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata, selain itu melakukan sosialisasi kepada petugas pemungut retribusi objek wisata tentang prosedur teknis

dalam melakukan pemungutan retribusi sehingga dipahami oleh petugas serta mengadakan pembinaan dan pengarahan kepada petugas pelaksana sehingga memahami mekanisme dalam pemungutan retribusi objek wisata.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pengelolaan retribusi objek wisata petugas diberikan pengarahan dan sosialisasi terkait dengan mekanisme pemungutan retribusi objek wisata secara jelas sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Sebaiknya dilakukan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan retribusi objek wisata sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam memperbaiki berbagai permasalahan dalam pengelolaan retribusi objek wisata.
3. Petugas sebaiknya meningkatkan kerja sama dengan petugas lain dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Adisasmita, Rahardjo, (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Afifiddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.

- Ahmad Rohani. (2010). *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darise, Nurlan. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Josef Riwu Kaho, (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mahmudi. (2012). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UPP STIM. YKPN: Yogyakarta.
- Garis, R. R. (2019). *Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(1), 664-677.